**Modul Perkuliahan Sesi 2**

***CIVICS, CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION***

Disusun Oleh:

Nurul Febrianti, M.Pd.

Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan (citizenship) telah dikenal sejak zaman Aristoteles (384\_322 BC). Pada masa awal kewarganegaraan ditentukan oleh penduduk atau hanya sekedar kemampuannya di dalam pengadilan.

Warga negara adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memgang jabatan. Konsep kewarganegaraan bersifat kontekstual artinya konsep ini tidak steril terhadap perubahan yang terjadi dimasyarakat dan pemerinntahan dinegara tersebut. Tiap negara memungkinan memiliki sistem dan peraturan tersendiri tentang kewarganegaraan.

*Civics* sebenarnya dilakukan dan dikembangkan diseluruh dunia meskipun dengan berbagai macam istilah atau nama. Civic memiiliki peran yang strategis dalam rumusan “Civic Internasional”, disepakati bahwa pendidikan demokrasi amatlah penting untuk keberhasilan perkembangan dan pemeliharaan pemerintah demokrasi (Mansoer, 2005). Namun semua itu mungkin akan sulit apabila peran dan fungsi *civics* yang diajarkan tidak memakai metode yang tepat hal ini perlu sebagai calon pendidik lebih mengenal lagi arti sebenarnya *civics, civic education dan citizenship education*. Maka pada modul ini akan membahas dan menerangkan lebih luas apa itu civics, civic education dan citizenship education.

1. **Civics (Ilmu Kewarganegaraan)**

Civics berasal dari kata latin civicus yang berarti warga negara (citizen atau citoyen). Disebut negara kota karena pada masa itu di Greek (sekarang Yunani) yang dianggap sebagai warga negara adalah sebatas kota dan karena itu yang dianggap sebagai warga negara adalah warga dari sebuah “negara” kota (citi state) dan bukan seperti negara yang dikenal dalam peristilahan negara modern sebagai sebuah negara bangsa (nation state).



Warga Negara Kota Yunani dalam Proses Berdemokrasi

Sedangkan Carter Van Good (1973:99) memberi argument mengapa Civics disebut ilmu kewarganegaraan karena di belakang kata Civics terdapat huruf s, ini menunjukkan sebagai sebuah ilmu sama seperti Economics atau Politics. Ilmu kewarganegaraan ini tentu saja sebagai sebuah disiplin ilmu yang memilki tujuan, metode, dan objek studi tertentu.

Civics, selain bertujuan membentuk warga negara yang baik yaitu warga negara yang tahu dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara, Civics juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang mampu membudayakan lingkungannya serta mampu memecahkan masalah-masalah individu warga negara yang mampu memecahkan masalahnya secara individual maupun masyarakat di sekitarnya. Hubungan antar Civics, civic education dan citizenship education. Civics atau juga disebut ilmu kewarganegaraan menekankan pembahasannya pada aspek teroritik tentang hah-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang baik. Bagaimana kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) juga secara sekilas telah dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan perluasan dari civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu, maka pendidikan kewarganegaraan juga disebut sebagai pendidikan orang dewasa (adult aducation) yang mempersiapkan siswa menjadi calon warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Citizenship education mengenai hal ini Stanley B. Dimond (Numan Somantri, 1968: 11) menjelaskan tentang pengertian civicsatau citizenship education dalam arti luas dan sempit dalam kaitannya dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Gross and Zeleny menyatakan bahwa pengertian civics lebih menekankan pada teori dan praktik pemerintah demokrasi sedangkan dalam arti luas lebih diorientasikan pada citizenship education yang lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan.

1. Civics sebagai Ilmu Kewarganegaraan (IKN)

Civics dalam perkembangannya menunjukkan bahwa ilmu kewarganegaraan ini dapat berkembang dan tumbuh jika menjalin hubungan yang saling memperkaya antara berbagai disiplin ilmu social dan bahkan “trans” disiplin karena pendekatan multidisiplin sebagai salah satu cirinya. Atas dasar itu ilmu kewarganegaraan tersebut memberikan pemahaman dasar-dasar teoritik tentang kewarganegaraan.

1. Civics Sebagai Pengetahuan Warga Negara

Sebagai warga negara yang baik untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya maka seorang warga negara seharusnya memiliki pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai (*civic knowledge, civic skills, and civic values*) yang dapat diperoleh dari berbagai disiplin ilmu sosial yang dapat digunakannya secara baik guna mempermudahkannya dalam kehidupannya dimasyarakat terutama di dalam membuat keputusan serta didalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya baik sebagai individu, anggota masyarakat ataupun sebagai warga negara. Tentu Zeleny tentang bagaimana seorang warga negara dalam merespons dan bertindak dilingkungannya dengan dengan memiliki kepekaan sosial, tanggung jawab dan kecerdasan sosial. (Gross and Zeleney, 1958). Memiiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai warga negara harus dapat dilakukan secara efektif sebagai seorang warga negara yang efektif yaitu warga negara yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam mencapai tujuan masyrakat secara cepat. (James Banks, 1977).

Ilmu Kewarganegaraan sebagai suatu istilah telah banyak mengalami perubahan. Paling tidak, sejak diperkenalkannya pendidikan dalam rangka nation and character building telah dikenal istilah Burgerkunde, Ilmu Kewarganegaraan, Kewarganegaraan, Civics, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara dan dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal dengan istilah Pendidikan Kewarganegaraan.

Kewargaan Negara sebagai suatu istilah dipakai secara resmi pada tahun 1967 dengan Instruksi Direkur Jendral Pendidikan Dasar Nomor 31 tahun 1967 tanggal 28 Juni 1967. Dari Seminar Nasional Pengaiaran dan Pendidikan Civics di Tawangmangu Surakarta 1972 ditegaskan bahawa Civics digan­ti dengan Ilmu Kewargaan Negara. Ilmu Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dibedakan dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan terjemahan dari Civics Education.

Ilmu Kewarganegaraan adalah suatu disiplin ilmu yang objek studinya mengenai peranan warga negara dalam bidang spiritu­al, sosial ekonomi, politis, yuridis, kultural dan hankam sesuai dan sejauh yang diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang tujuan utamanya membina warga Negara yang lebih baik menurut syarat-syarat, criteria dan ukuran ketentuan Pembukaan Unang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bahannya salah satunya diambilkan dari Ilmu Kewarganegaraan. Dengan demikian, apabila dicermati lebih jauh, Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada objek materianya, yakni warga negara, khususnya demokrasi politik atau peranan warga Negara, hubungan warga Negara dengan Negara. Perbedaan Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan terletak pada objek formanya atau focus perhatiannya. Ilmu Kewarganegaraan sebagai ilmu yang deskriptif, sehingga pusat perhatiannya pada deskripsi peranan warga Negara dan hubungan warga egara dengan Negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ilmu yang bersifat normative, sehingga pusat perhatiannya terletak pada pembinaan peranan warga negara atau pendewasaan warga negara.

Ilmu Kewarganegaraan (Civics) dalam. perkembangannya sebagai ilmu memiliki banyak definisi antara lain:

1. Civics: the study of city government and the duties of citizens (The Advanced Learner's Dictionary­ of Current English, 1954)
2. Civics: the element of political science or that science dealing with right and duties of citizens (Dictionary of Education, 1956)
3. Civics: the departement of political science dealing with rights and duties of citizens (Webster's New Collegiate Dictionary, 1954)
4. Civics : the science right and duties of citizenship, esp, as the subjec of a school course ( A Dictionary of American,1956 )
5. Civics : Science of government (Webster's New Coneise Dic­tionary)
6. Civics : the science of citizenship‑the relation of man to man in organized collection‑the individual to the State (Creshore. Education.VII, 1886­1887)
7. Civics : the study of government and citizenship that is, the duties right and priviledge of citizens (Edmonson, 1968)

Dari definisi tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa Civics atau Ilmu Kewarganegaraan menyangkut hal‑hal sebagai berikut:

1. Kedudukan dan peranan warga negara
2. Hak dan kewajiban warga negara
3. Pemerintahan
4. Negara
5. Sebagai bagian dari Ilmu Politik, mengambil bagian demo­krasi politik (political democracy).

Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan

Berdasar pada pengertian Ilmu Kewarganegaraan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, tampak bahwa Ilmu Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan sebagai bagian dari Ilmu Politik. Sebagai bagian dari Ilmu Politik, yang menjadi ruang lingkup Civics adalah demokrasi politik. Isi atau materi demokrasi politik (Marian D. Irish), adalah:

1. Konteks ide demokrasi, yang mencakup: teori-teori tentang demokrasi politik, teori majority rule, minority rights, konsep-konsep demokrasi dalam masyarakat, teori demokrasi dalam pemerintahan, pemerintahan yang demokratis.
2. Konstitusi Negara, yang mencakup: sejarah legal status, nation building, identity, integration, penetration, participation, and distribution.
3. Input dari system politik, yang mencakup: arti pendapat umum terhadap kehidupan politik, studi tentang political behavior.
4. Partai Politik dan Pressure Group, yang mencakup: system kepartaian, fungsi partai politik, peranana pressure group, public relation.
5. Pemilihan Umum, yang mencakup: maksud pemilu dalam distribusi kekuasaan, system pemilu.
6. Lembaga-lembaga decision maker, yang mencakup: legislator dan kepentingan masyarakat, peranan policy maker Presiden.
7. Presiden sebagai Kepala Negara/Administrasi Negara, yang mencakup: kedudukan Presiden menurut konstitusi, control lembaga legislative terhadap Presiden dan birokrasi, pemerintahan di bawah konstitusi.
8. Lembaga Yudikatif, yang mencakup: system peradilan dan administrasi peradilan, hakim dan kedudukan seseorang dalam pengadilan, hubungan badan legislative, eksekutif, dan yudikatif.
9. Output dari system politik, yang mencakup: hak individu dan kemerdekaan individu dalam konstitusi, kebebasan berbicara, pers dan media massa, kebebasan akademik, perlindungan yang sama, cara penduduk Negara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.
10. Kemakmuran umum dan pertahanan Negara, yang m,encakup: tugas Negara dan warga Negara dalam mencapai kemerdekaan umum, hak-hak memiliki harta kekayaan, politik pajak untuk kemakmuran umum, politik luiar negeri dan keselamatan nasional, hubungan internasional.
11. Perubahan social dan demokrasi politik, yang mencakup: demokrasi politik dan pembangunan masa sekarang, mengefektifkan dan mengisi demokrasi politik, tantangan perkembangan sains teknologi.

Sebagai ilmu yang berdiri sendiri, menurut Achmad Sanusi, focus studi Ilmu Kewarganegaraan adalah mengenai kedudukan dan peranan warga Negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dan sepanjang batas-batas ketentuan konstitusi Negara yang bersangkutan. Titik tolak Ilmu Kewarganegaraan ada pada individu-individu sebaghai kesatuan mikro. Variable-variabel yang relevan dengan individu sebagai kesatuan mikro adalah kontinum tingkah laku, potensi, kesempatan, hak dan kewajiban, cita-cita, aspirasi, kesadaran usaha dan kegiatan, kemampuan, peranan hasil dan potensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sepanjang ketentuan Pembukaan UUD 1945. Menurut Numan Somantri, objek studi Ilmu Kewarganegaraan adalah warga Negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, social, ekonomi, agama, kebudayaan, dan Negara, tingkah laku, tipe pertumbuhan berpikir, potensi, hak dan kewajiban,k cita-cita, aspirasi, kesadaran, p[artisipasi dan tanggung jawab. Dikaitykan dengan kedudukannya sebagai mata kuliah pada program studi, Soedibjo (1990) berpendapat bahwa materi Ilmu Kewarganegaraan mencakup segala pengetahuan tentang kedudukan, peranan, hak dan kewajiban warga Negara Indonesia sesuai dengan dasar filsafat Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Materi-materi yang dimaksud, antara lain:

1. Pengertian Ilmu Kewarganegaraan
2. Sejarah perkembangan Civics di Amerika Serikat
3. Sejarah perkembangan Civics di Indonesia
4. Objek studi, metode, sistematika dan tujuan Ilmu Kewarganegaraan
5. Ruang lingkup Ilmu Kewarganegaraan
6. Pengertian Negara, unsure-unsur Negara, cara timbul dan lenyapnya Negara.
7. Pengertian warga Negara, orang asing, penduduk, rakyat dan bangsa.
8. Azas-azas kewarganegaraan, bipatride-apatride, hak opsi, hak repudiasi.
9. Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. Hak-hak azasi dan hak-hak serta kewajiban warga Negara berdasar pancasila dan UUD 1945
11. Peranan rakyat dalam pemerintahan dan pembangunan suatu bangsa
12. Kepentingan pribadi dan kepentingan umum
13. Wilayah Negara Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Tujuan Ilmu Kewarganegaraan

Secara substansial, tujuan Ilmu Kewarganegaraan sesungguhnya sangat berdekatan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Dalam usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) tanggal 29 Desember 1945 telah dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang kemudian oleh Kementrian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dirumuskan dalam tujuan pendidikan:”…. untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat” dengan cirri-ciri perasaan bakti kepada Tuhan yang Maha Esa; perasaan cinta kepada negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati berdasarkan rasa keadailan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan keyakinan bahwa negara memerlukan warganegara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan (Djojonegoro, 1996).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, menyatakan bahwa “… membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adanya rumusan membentuk warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air, menunjukkan adanya kesadaran akan arti pentingnya keberadaan warga negara yang baik (good citiezenship) bagi negara Indonesia. Tak lama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahaun 1954, kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari rumusan “… melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa Pancasila.

Kesadaran akan arti penting pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangan selanjunya dapat dilihat dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana terumus dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah “ … mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang …. memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Djojonegoro, 1996). Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, antara lain dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar …. menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan Ilmu Kewarganegaraan meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berperilaku sebagai warga negara. Secara terinci, tujuan Ilmu Kewarganegaraan adalah:

1. Mengalihkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan kriteria, ukuran dan ketentuan konstitusi negara;
2. Menumbuhkan kesadaran dan sikap sebagai warga negara yang baik;
3. Menumbuhkan periulaku warga negara yang baik dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kriteria, ukuran ketentuan konstitusi negara.

Dalam kedudukannya sebagai mata kuliah, tujuan Ilmu Kewarganegaraan adalah membekali mahasiswa agar memiliki pengetahuan tentang kedudukan, peranan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan dasar filsafat Pancasila, Pembukaan dan pokok-pokok konstitusional lainnya.

1. **Civic Education**

Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik yang ditujukan kepada peserta didik atau warga negara yang bersangkutan. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) dinyatakan sebagai upaya menerapkan civics (Ilmu Kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. John J. Cogan (1999) mengartikan civic education sebagai “…the foundational course work in school designed to prepare young citizens for role in their communities in their adult lives.” Civic education adalah suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Civic education adalah pendidikan kewargaanegaraan dalam pengertian sempit yaitu sebagai bentuk dari pendidikan formal, seperti mata pelajaran dan mata kuliah serta kursus di lembaga sekolah / unversitas atau juga lembaga formal lain.

Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan atau pelajaran yang mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban suatu warga negara, dengan tujuan supaya setiap hal-hal yang di kerjakan itu bisa sesuai dengan tujuan dan juga cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari apa yang di harapkan. Karena sangat penting sekali pendidikan kewarganegaraan ini maka pendidikan kewarganegaraan ini sudah terapkan dimulai dari usia dini pada tiap-tiap jejang pendidikan mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education merupakan penerapan dari civics (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan / pembelajaran, yang dapat diartikan bahwa program civic education ini materi utamanya adalah demokrasi politik.

1. **Citizenship Education**

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) adalah perluasan dari civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Oleh sebab itu, Pendidikan kewarganegaraan juga disebut pendidikan orang dewasa (adult education) yang mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memahami perannya sebagai warga negara. Dimond mengemukakan bahwa pengertian civics atau citizenship education memiliki makna dalam arti luas dan arti sempit bila dikaitkan dengan kehidupan sekolah dan masyarakat. Dalam arti sempit, Civics lebih menekankan pada aspek teori dan praktik pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam arti luas yang disebut citizenship education lebih menekankan pada keterlibatan dan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyrakatan.

Citizenship Education atau education for citizenship diartikan sebagai “the more inclusive term and encompasses both these in –school experience as well as out of-school or non formal/informal learning which takes places in family, the religious organization, community organization, the media, etc which help to shape the totally of the citizen.”

Selanjutnya disimpulkan bahwa “citizenship education atau education for citizenship” dipandang sebagai “is large overarching concept here while civic education is but one part, albeit a very important part, of one’s development a citizen.”

Citizen atau warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hubungan internasional di setiap wilayah negara selalu ada warga negara dan orang asing yang semuanya disebut penduduk. Setiap warga negara adalah penduduk suatu negara, sedangkan setiap penduduk belum tentu warga negara.

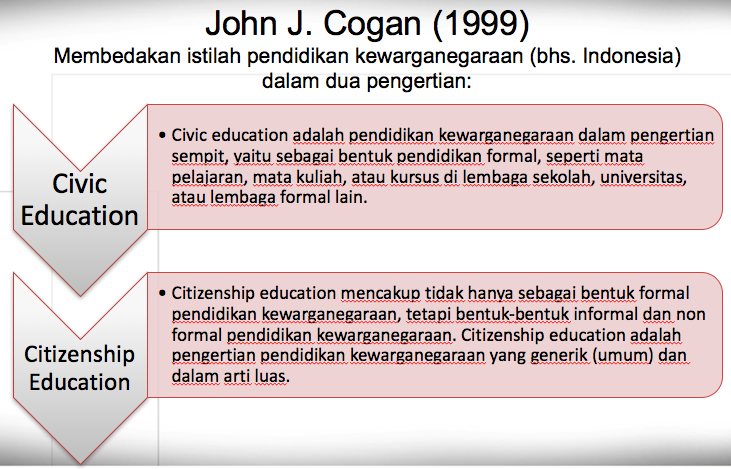
Citizenship atau Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (bahasa Inggris: citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (bahasa Inggris: nationality). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (negara), dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu negara.

Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini biasanya ditentukan berdasarkan salah satu dari dua prinsip, yaitu prinsip ‘ius soli’ atau prinsip ‘ius sanguinis’. Yang dimaksud dengan ‘ius soli’ adalah prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran, sedangkan ‘ius sanguinis’ mendasarkan diri pada prinsip hubungan darah.

Istilah kewarganegaraan (citizenship) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara neagara dengan warga negaranya. Seperti yang di jelaskan dalam Pasal II Peraturan Penutup Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, dimana kewarganegaraan diartikan sebagai segala jenis hubungan dengan suatu yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut UU Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara. (Pendidikan Kewarganegaraan, Winarno, S.Pd. M.Si.).



Perbedaan Civic Education dan Citizenship Education menurut John J. Cogan (1999)

1. **Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan**

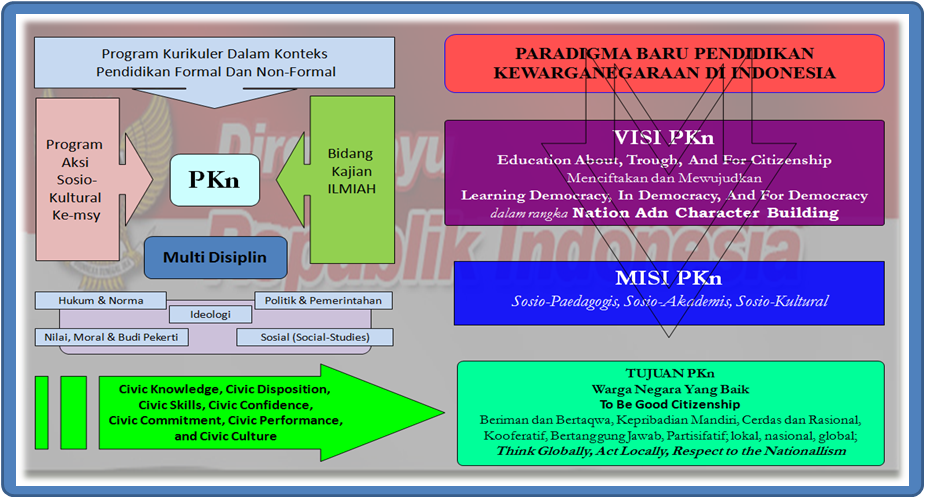
Dalam pengembangan paradigma barunya Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih sesuai dengan tuntutan era reformasi dan demokratisasi di Indonesia, PKn mengemban visi sebagai program pendidikan tentang, melalui, dan untuk kewarganegaraan (education about, through, and for citizenship). Di samping itu, PKn juga diharapkan dapat menjadi wahana pendidikan demokrasi yang mampu menciptakan dan mewujudkan belajar demokrasi, dalam demokrasi, dan untuk demokrasi (learning democrasy, in democrasy, and for democrasy) bagi setiap insan warga masyarakat dan warga negara (Winataputra, 2001). Visi Pendidikan Kewarganegaraan seperti ini diarahkan dalam usaha menciptakan dan mewujudkan visinya sebagai pendidikan untuk membangun karakter bangsa (nation and character building) yang mampu berpikir global, bertindak lokal, dan komit terhadap bangsa dan negaranya (think globally, act locally, and commit nationally) (Sukadi, 2006).

Dengan visi seperti ini PKn memiliki misi sosio-paedagogis, sosio-akademis, dan sosio-kultural. Dengan misi sosio-paedagogisnya PKn berkewajiban memberdayakan peserta didik melalui proses-proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memiliki tujuh kecakapan kewarganegaraan yang meliputi: civic knowlidge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence, dan civic culture yang terintegrasi dalam kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia yang yang berkarakter dan demokratis (Winataputra, 2001).

Dengan misi sosio-akademis, selanjutnya, PKn haruslah dapat berfungsi bagi peserta didik untuk bersama-sama secara akademis mengembangkan kehidupan kewarganegaraan dan berdemokrasi yang lebih baik melalui berbagai kegiatan berpikir dan inkuiri reflektif terhadap berbagai masalah kewaganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKn dalam hal ini hendanya dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial atau melakukan rekayasa sosial bagi pendidik dan peserta didik dalam menerapkan prinsip berpikir dan penelitian ilmiah terutama menciptakan dan mengembangkan kehidupan kewarganegaraan yang demokratis dan berkarakter yang lebih baik sesuai tahap-tahap perkembangan berpikir sosial, emosional, dan moral peserta didik (Winataputra, 2001).

Dengan misi sosio-kultural, akhirnya, PKn haruslah dapat berfungsi bagi pendidik dan peserta didik untuk secara bersama-sama mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Disini PKn harus dapat menjadi wahana partisipasi sosial politik kewarganegaraan bagi pendidik dan peserta didik kepada kepentingan bersama sebagai warganegara dalam kehidupan demokratis menuju tujuan nasional negara Indonesia yang selalu mengarah kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang lebih baik berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 (Winataputra, 2001; Sukadi, 2009).

Jika visi di atas dapat menjadi pedoman yang riil dan dapat merealisasikan dalam misi dan tugas-tugas PKn, tentu tidaklah begitu mustahil untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan PKn itu sendiri sebagai wahana pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi. Dalam hal ini tujuan PKn adalah membangun dan memberdayakan warga negara yang baik, dalam arti: cerdas beriman dan bertaqwa, bermoral dan berbudi pekerti luhur, demokratis, bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang kuat, serta partisipatif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam bahasa pendidikan, PKn adalah wahana pendidikan dalam rangka nation and character building yang memungkinkan setiap warga negara memiliki kecakapan-kecakapan hidup kewarganegaraan menjadi wagna negara yang baik (to be good citizenship), yang meliputi: civic knowlidge, civic disposition, civic skills, civic confidece, civic commitment, civic competence yang secara utuh dapat digunakan untuk membangun dan mewujudkan budaya kewarganegaraan (civic culture) yang bermoral dan bermartabat (Wahab dalam Sukadi, 2009).



Peta Konsep Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Berdasarkan peta konsep di atas makan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengemban visi, misi, dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

1. **Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Demokrasi**

Mengikuti perkembangan konsep tentang warga Negara sebagai konsep politik Barat telah mendorong para peneliti dan ahli bidang PKn untuk melakukan berbagai studi yang hasilnya dapat dirasakan dalam perkembangan pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan dan PKn secara keseluruhan. Studi-studi tersebut tidak terlepas dari posisi ilmu-ilmu social khususnya bidang-bidang disiplin ilmu Politik, Sosiologi dan Ekonomi.

Mengapa? Karena tidak ada ahli sosiologi, misalnya yang dapat memahami studi kemasyarakatan tidak memasukkan sistem politik sebagai bagian utama analisisnya. Sebagai misal dapat dikemukakan bahwa studi kemasyarakatan pada sebuah masyrakat demokratis akan menempatkan prinsip demokrasi sebagai krakteristik dari sistem sosial dan tentunya juga akan dikaji berbagai topik diantaranya tentang kondisi-kondisi yang diperlukan untuk sebuah masyarakat dan organisasi-organisasi demokratis serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang didalam politik khususnya yang menyangkut perilakunya sebagai pemilih; dan sumber-sumber pendukung yang menunjang nilai-nilai dan gerakan-gerakan yang menghambat atau mempertahannkan lembaga-lembaga demokratis.

1. **Harapan untuk Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebagaimana di Negara-negara demokratis lainnya, PKn di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasanya sebagai warga negara untuk kemajuan diri dan lingkungannya. Mendidik warga negara yang dimokratis melalui mata pelajaran civics dan PKn di negara asalnya memang dapat berhasil dengan baik dalam menhasilkan warga negara yang demokratis karena bahan-bahan, metode mengajar yang digunakannya adalah bahan metode mengajar yang demokratis. Keberhasilan tersebut tidak hanya karena bahan dan metode mengajarnyta yang demokratis namun penilaian dan lingkungan serta seluruh perangkat hukum yang mendukungnyapun telah mengandung nilai-nilai demokratris. Pada masa pemerintahan Suharto mata pelajaran civics dan PKn yang dikala itu diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan yang bahan-bahan pormalnya memang berisi nilai-nilai pancasila ditambah dengan bahan-bahan formal kebijakan pemerintah yang jiga ditujukan menghasilkan warga negara yang harus sesuai dengan pandangan dan visi politik pemerintahan orde baru.

Citizenship Education: Adalah sebuah masyrakat yang beradab, menghargai harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi HAM, kebebasan dan keterbukaan serta keadilan dan persamaan dan bukan negara yang diatur oleh militer tetapi oleh sipil (pemerintah sipil).

Civic Education: Mata pelajaran bagi siswa sekolah yang membicarakan tentang hal-hal yang menyangkut kewarganegaraan dan pemerintahan demokratis. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Maksudnya warga yang ada di dalam suatu kota maka akan disebut warga kota, dimana warga dan kota merupakan kesatuan politik. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Civics bertujuan membentuk warga negara yang baik, maka dalam pembelajarannya haruslah mampu memberikan metode-metode pembelajaran yang tepat dan sesuai kebutuhan zaman. Warga negara adalah suatu harapan bangsa, namun apa dikata apabila perilaku manusia sebagai warga negara kurang bermoral, maka dari itu sebgai calon pendidik dalam mata kuliah PKn perlulah kita terus membenahi diri dan terus memperluas wawasan ilmu pengetahuan agar dalam mebelajarkan PKn bisa mencetak warga negara yang baik.

Demikian modul perkuliahan untuk sesi 2 dengan pembahasan Civics, Civic Education, Citizenship Education. Selanjutnya pada modul berikutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan PKn secara singkat di Amerika dan Indonesia.

Terima kasih.